

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam memberikan informasi publik dengan efektif dan efisien. Berdasarkan Undang-undang tersebut, semakin besar tuntutan pemerintah dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi. Perkembangan teknologi informasi memberikan opsi bagi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas dan transparansi melalui internet. Survei yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet Indonesia tahun 2016 mencapai 132,7 juta atau setara 51,7% terhadap populasi 256,2 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa internet menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Survei juga menyebutkan konsumsi pengguna tentang berita, masuk tiga besar konten internet yang dicari dengan angka 127,9 juta (96,4%) (Buletin APJII, 2016). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa internet selain menjadi kebutuhan penting, juga digunakan untuk mengakses informasi-informasi mengenai pemerintahan. Masyarakat sendiri dapat mengakses informasi-informasi mengenai pemerintahan yaitu di *Website* pemerintah daerah. Meskipun demikian, nampaknya pemerintah daerah belum

memaksimalkan *websitenya* sebagai pemberi informasi-informasi mengenai pemerintahannya.

Sejauh ini praktik yang dilakukan pemerintah daerah pada *website* dalam memberikan informasi telah berjalan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peraturan di Indonesia yang menyebutkan secara implisit tentang pemanfaatan media elektronik dalam mengungkapkan informasi kepada masyarakat. Peraturan tersebut antara lain PP No.6 Tahun 2008, PP No.3 Tahun 2007, dan Permendagri No.7A Tahun 2007. Akan tetapi, terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum memberikan informasi secara lengkap seperti laporan keuangan dan kinerja (Internet Reporting) pada *website* pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian Trisnawati dan Achmad (2014) yang menemukan bahwa tidak seluruh pemda mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap tiap tahunnya. Sedangkan, untuk menjadi pemerintah daerah yang *good governance*, Pemerintah daerah harus akuntabel dan transparan.

Pada era teknologi masa kini penggunaan internet adalah sarana yang murah dan mudah dalam memberikan informasi. Internet dapat dimanfaatkan dalam menunjukkan transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah daerah. Internet juga digunakan oleh kepala daerah dalam mengungkapkan pertanggungjawaban secara sukarela dan konkrit dalam mewujudkan akuntabilitasnya (Febrianty dan Jatmiko, 2011). Dengan adanya internet reporting maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi. akan tetapi terdapat beberapa pemerintah daerah yang tidak melakukan internet reporting dengan baik,

dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang membuat pemerintah daerah tidak melakukan internet reporting.

Pada penelitian Nosihana dan Yaya (2016) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktek Internet *reporting* mereka menemukan bahwa kompetisi politik berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan di internet. Dalam hal ini pejabat pemerintah yang sedang menjabat akan berusaha sebaik mungkin memperlihatkan kinerjanya melalui pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintahan. Dengan demikian pejabat akan mendapat perhatian dan kepercayaan dari masyarakat yang telah memilih sebelumnya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Rahman (2013). Dengan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah agar pada masa pemilihan umum dapat terpilih kembali, transparansi dilakukan melalui internet karena dianggap mudah dan murah serta dapat diakses siapa saja. Selain kompetisi politik, kekayaan daerah juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi internet reporting.

Selain itu hasil dari penelitian Rahman (2013) juga menyatakan bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap pelaporan informasi keuangan Pemda. Mereka menyatakan bahwa kekayaan daerah mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang baik, maka tidak menjadi masalah bagi pemerintah untuk melaporkan informasi keuangannya. Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Hudoyo (2014) yang menyatakan bahwa Kekayaan daerah tidak berpengaruh terhadap pelaporan keuangan di internet. Dalam penelitiannya mereka mengatakan

Tingkat kekayaan daerah yang besar menjadikan pemerintah pusat harus memperhatikan kinerja Pemerintah daerah dengan pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelaksanaan audit akan menghasilkan temuan audit yang kemudian akan dikeluarkan Opini Audit yang menjadi gambaran Kinerja Pemerintah daerah. Pada penelitian Hilmi dan Martani (2012) temuan audit berpengaruh positif terhadap pelaporan informasi keuangan. Mereka mengatakan bahwa tingkat penyimpangan yang dilakukan aparat pemerintah akan mengurangi pengungkapan laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan aparat pemerintah berusaha menutupi penyimpangan yang dilakukan mereka. Akan tetapi hasil penelitian Khasanah (2014) mengatakan yang berbeda bahwa Temuan audit tidak berpengaruh positif terhadap Pelaporan Keuangan. Mereka menyebutkan jika ada temuan pelanggaran yang dilakukan maka BPK akan meminta peningkatan pengungkapan dan koreksi. Sehingga, semakin besar adanya temuan maka semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangannya.

Penelitian-penelitian terdahulu seperti yang telah dipaparkan diatas memiliki temuan hasil yang berbeda-beda atau tidak konsisten. Selain itu pada variabel yang sama, namun dengan rumus perhitungan data yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan hasil pada penelitian. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memperkuat hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memiliki keterbatasan penelitian. Pada penelitian Nosihana dan Yaya (2016) yang menguji ketersediaan informasi keuangan saja. Akan tetapi pada penelitian ini tidak

hanya ketersediaan informasi keuangan namun juga mengenai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal ini dikarenakan pengungkapan yang dilakukan pemerintah tidak hanya mengenai laporan keuangan saja namun juga mengenai kinerja selama mereka menjabat yang kemudian dapat disebutkan sebagai Internet reporting Pemerintah daerah. Trisnawati dan Achmad (2014) juga menyatakan bahwa keterbatasan penelitian mereka adalah rendahnya kemampuan dalam menjelaskan publikasi laporan keuangan pemda melalui internet. Pada penelitian Nosihana dan Yaya (2016) digunakan enam variabel independen yaitu kompetisi politik, ukuran pemda, rasio pembiayaan hutang, kekayaan pemda, tipe pemda, dan opini audit. terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan 4 variabel independen antara lain kompetisi politik, kekayaan daerah, opini audit dan akuntabilitas kinerja.

Selain itu tidak konsisten atau perbedaan hasil pada penelitian mengenai internet reporting memberikan jawaban bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban untuk mendukung penelitian mengenai Internet Reporting. Serta memberikan gambaran kepada masyarakat dan pengguna informasi mengenai akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Selain itu dapat memotivasi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah melalui internet untuk menjadi *good governance*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas serta Determinan dalam penelitian ini. maka ditemukan masalah dalam penelitian. maka rumusan masalah dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Apakah Kompetisi Politik berpengaruh positif terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah ?
2. Apakah Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah ?
3. Apakah Opini Audit berpengaruh Positif terhadap Internet Pemerintah Daerah ?
4. Apakah Akuntabilitas Kinerja berpengaruh positif Terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kompetisi Politik terhadap Internet Reporting Pemerintah daerah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah.

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh Opini Audit terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh Predikat Akuntabilitas Kinerja terhadap Internet Reporting Pemerintah Daerah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Timbulnya keraguan pada sebuah teori menjadikan penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai wawasan yang sesuai dengan penelitian ini. Di era digitalisasi ini diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan informasi serta menambah literatur memperkaya wawasan konsep tentang *good governance* di jaman kemajuan IT.

2. Manfaat Praktis

Bagi pembuat kebijakan dan jajarannya mendapatkan motivasi dalam mengungkapkan informasi keuangan dan kinerjanya di internet atau Internet Reporting.